**MAKALAH TEORI ILMU SOSIAL**

**Refleksi Pemikiran Mansur Fakih mengenai Keadilan Gener sebagai Alat Transformasi Sosial dalam Kehidupan di Indonesia Saat Ini**

Dosen Pengampu: Dr. Nasiwan, M .Si.

****

Disusun oleh:

Ina Arifa (16416241024)

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2017**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Refleksi Pemikiran Mansur Fakih Mengenai Keadilan Gener Sebagai Alat Transformasi Sosial dalam Kehidupan di Indonesia Saat Ini” dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya.

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, Kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah dibuat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi diri sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi perbaikan makalah ini di waktu yang akan datang.

Yogyakarta, 23 Desember 2017

**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| **HALAMAN SAMPUL** ............................................................................... | 1 |
| **KATA PENGANTAR** ................................................................................ | 2 |
| **DAFTAR ISI** ............................................................................................... | 3 |
| **BAB I PENDAHULUAN** |  |
| 1. Latar Belakang Masalah ................................................................... | 4 |
| 1. Rumusan Masalah ............................................................................ | 5 |
| 1. Tujuan .............................................................................................. | 5 |
| 1. Manfaat ............................................................................................ | 5 |
| **BAB II PEMBAHASAN** |  |
| 1. Biografi Mansur Fakih..................................................................... | 7 |
| 1. Konsep Mansur Fakih Mengenai Keadilan Gender......................... | 10 |
| 1. Permasalahan Ketidakadilan Gender di Indonesia........................... | 14 |
| 1. Upaya Mengatasi Masalah Ketidakadilan Gender yang ada di Indonesia .......................................................................................... | 28 |
| **BAB III PENUTUP** |  |
| 1. Kesimpulan ...................................................................................... | 33 |
| 1. Saran ................................................................................................ | 34 |
| **DAFTAR PUSTAKA** ................................................................................ | 35 |
| **LAMPIRAN** ............................................................................................... | 36 |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Sasaran utama dari pembangunan nasional negara Indonesia adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat Indonesia di berbagai bidang. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa di dalam proses pembangunan tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara serasi, selaras dan seimbang. Selama ini pembangunan yang suadah dilaksanakan belum secara khusus mempertimbangkan manfaatnya secara adil terhadap kaum laki-laki dan kaum perempuan. Padahal secara teoritik pemerintah telah berupaya meningkatkan status dan kedudukan perempuan dalam semua aspek pembangunan, yang telah dicantumkan dalam arahan GBHN 1999, UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, serta dalam Inpres No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kesetaraan dan keadilan gender sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Disadari bahwa keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat bergantung dari peran serta kaum laki-laki maupun kaum perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat dari adanya hasil pembangunan. Namun, pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda bangsa dan memerlukan dukungan dari semua pihak.

Partisipasi dari kaum perempuan dalam setiap proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Kurang berperannya kaum perempuan, akan memperlambat proses pembangunan atau bahkan kaum perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri. Namun selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga hal tersebut turut memberi kontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender. Emansipasi dalam bidang kesempatan kerja tersebut berarti kaum perempuan diberi kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam berperan serta di dalam pembangunan dan dalam mengembangkan keberadaan kehidupan pribadinya.

Namun, kenyataannya dalam beberapa aspek pembangunan, kaum perempuan kurang dapat berperan aktif. Hal ini disebabkan karena kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan dibanding kaum laki-laki. Seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya pembangunan, sistem upah yang merugikan, tingkat kesehatan, sehingga manfaat pembangunan kurang diterima kaum perempuan. Selain itu rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerusnya, mengingat mereka mempunyai peran reproduksi yang sangat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan.

1. **Rumusn Masalah**
2. Bagaimana biografi Mansur Fakih?
3. Bagaimana konsep Mansur Fakih mengenai keadilan gender?
4. Bagaimana permasalahan yang ada di Indonesia saat ini yang berkaitan dengan gender?
5. Bagaimana upaya mengatasi masalah ketidakadilan gender yang ada di Indonesia?
6. **Tujuan**
7. Untuk mengetahui biografi Mansur Fakih.
8. Untuk mengetahui konsep Mansur Fakih mengenai keadilan gender.
9. Untuk mengetahui permasalahan yang ada di Indonesia saat ini yang berkaitan dengan gender.
10. Untuk mengetahui upaya mengatasi masalah ketidakadilan gender yang ada di Indonesia.
11. **Manfaat**

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat.
2. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.
3. Sebagai bahan referensi dalam penulisan selanjutnya.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Biografi Mansur Fakih**

Mansur Fakih lahir pada tanggal 10 Oktober 1954 di desa Ngawi, Bojonegoro, Jawa Timur. Ayahnya bernama Mansur bin Yahya dan ibunya bernama Siti Maram binti Imam Fakih. Mansur Fakih merupakan anak tertua dari sembilan bersaudara. Beliau menikan dengan Nena Lam’anah, yang dikaruniai dua anak laki-laki. Karir akademis Mansur Fakih dimulai sejak beliau diterima menjadi seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang dulunya dikenal sebagai Institut Agama Islam Indonesia (IAIN). Beliau memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ushuludin *(Islamic theologi)* IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selesai pada tahun 1979. Beliau mendapatkan gelar Master Pendidikan dan Perubahan Sosial (M.Ed*. in Education and Social Change*) dari University of Massachusetts pada tahun 1990.

Pada tahun 1994, beliau menyelesaikan pendidikan doktor dari universitas yang sama, Mansur Fakih menggunakan pengalaman aktivisme sosialnya di Indonesia untuk membangun sebuah teori dan kritik terhadap studi pembangunan. Keterlibatan aktifitasnya dibidang keaktivitisan, terutama dalam kaitannya dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), telah digelutinya sejak tahun 1997, ketika terlibat aktif sebagai fasilitator dan pendidikan HAM. Pada saat yang sama, Mansur Fakih menjadi gender *training specialist and management consultant,* *CIDA-Woman Support Proje*ct pada tahun 1997 sampai 2001. Dan sejak tahun 2001, beliau menjadi Direktur dari Institur for Social Tranformation *(INSIST PRESS)* Yogyakarta dan juga Senior *Researcher of Institut of Development Studies, University of Sussex, Brighton UK*. Selain itu, beliau juga mengajar pada Progam Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pemikiran-pemikiran dari Mansur Fakih dikategorikan sebagai pedagogi kritis Freire versi Indonesia, karena beliau menggunakan metodologi pendidikan kritis dalam pemikiran dan aktivisme sosialnya. Selain itu, beliau juga mengintegrasikan ide aktivisme sosial dengan alam ideal teorisasi akademis. Melalui pendekatan tersebut, kemudian beliau membangun tradisi intelektual organik di antara aktivis gerakan sosial dan ilmuan Indonesia. Salah satu falsafah hidup beliau, yaitu “idelism tanpa ilmu kosong, ilmu tanpa idealism mubadzir”. Filsafat hidup tersebut membawanya ke pengembangan pendidikan popular sebagai salah satu fokus aktivisme sosialnya setelah menyelesaikan progam doktoral. Selama Mansur Fakih mengikuti progam training di progam doktoral, pemikirannya diperdalam dengan ide-ide Antonio Gramsci dan teori-teori gerakan feminisme.

Pada tahun 1994, Mansur Fakih bersama dengan teman-temannya mendirikan *Resource Management and Development Consultants* (REMDEC) di Jakarta yang bertujuan untuk memfasilitasi *capacity building* untuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi komunitas. Namun, REMDEC tidak dapat beroperasi maksimal seperti yang telah dicita-citakan, karena sebelum dan pada tahun 1997 rezim Suharto bereaksi secara gresif terhadap berbagai bentuk aktivisme sosial di Indonesia yang dianggap berani memberontak serta mengancam kestabilan kekuasaan dan keamanan nasional. Setelah berdiskusi panjang dengan Roem Topatimasang atas permasalahan tersebut, Mansur dan Roem berinisiatif untuk mendirikan sebuah organisasi yang bersifat lebih fleksibel daripada REMDEC yang kemudian diberi nama Institute for Social Transformation atau Insist. Organisasi tersebut dibentuk sebagai respons terhadap proes pembangunan di Indonesia yang termasuk di dalamnya kritik terhadap maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi agen dan pendukung pelaksanaan progam-progam pemerintah yang tidak berkeadilan sosial. Selain itu, untuk mengevaluasi LSM yang selama ini sangat bergantung pada dana asing selama era globalisasi.

Mansur Fakih dikenal sebagai pendamping masyarakat *(community organizer),* fasilitator berbagai pelatihan pengembangan masyarakat dan konsultan pengembangan organisasi kemasyarakatan sejak tahun 1978. Dalam kehidupannya, beliau tidak tumbuh dari laboratorium sepi dan menara gading intelektual yang angkuh. Beliau tumbuh dari dialektika teori dan praktik, bersama dengan teman-temannya dari gerakan aktivis, menekuni dalam bidang pembangunan, lingkungan, pembaharuan agrarian, keadilan gender, kaum cacat dan lain-lain. Lembaga pendidikan bagi Mansur Fakih, hanyalah proses menjinakkan peserta didik dan sama sekali tidak memberikan kesempatan untuk berpikir kreatif, pendidikan yang terbaik adalah yang berada di tengah-tengah masyarakat, dikalangan petani dan buruh, yaitu pendidikan yang membebaskan.

Pada tahun 1993 -1997, Mansur Fakih sempat menjabat sebagai *country representantive of OXFAM United Kingdom and Ireland* mewakili Indonesia, yang bertugas untuk mengembangkan progam pengembangan masyarakat dengan perpektif gender dan hak asasi manusia (HAM). Melalui OXFAM, Mansur Fakih memperkenalkan analisis gender dan beragam pendekatan gendr lainnya secara lebih komprehensif kepada aktivos gerakan sosial Indonesia. Selain beliau menjadi representasi OXFAM, juga dipilih sebagai utusan Indonesia dalam *“Helsinski Process”*, sebuah forum internasional yang diinisiasi pendiriannya oleh menteri luar negeri Finlandia, beberapa negara selatan dan LSM internasional untuk membuka dialog inklusif antar s*takeholder* utama dengan pemerintahan global dalam mengatasi masalah yang dihasilkan dari proses globalisasi.

Pemikiran Mansur Fakih mengenai pesantren sangat begitu menarik, beliau yakin bahwa pesantren memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membantu kelompok-kelompok yang dilemahkan dalam masyarakat, terutama disekitar pesantren. Namun, potensi tersebut justru menyedot secara terus menerus sumber daya ekonomi masyarakat sekitarnya untuk mendukung aktivitas yang ada di dalam pesantren.

Dalam perjalanan mas hidupnya, beliau selalu mengikuti dunia pemikiran dan pergerakan keadilan hak asasi manusia (HAM) dan beliau telah banyak menyumbangkan karya-karyanya, salah satu diantaranya adalah berupa sebuah karya tulis yang sanagat berharga bagi kalangan aktivis maupun para ilmuwan lainnya, seperti:

1. *“Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi.”*
2. *“Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat.”*
3. *“Pergolakan Ideologi LSM Indonesia.”*
4. *“Masyarakat Sipil untuk Tranformasi Sosial.”*
5. *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial.”*
6. *“Analisis Gender dan Transformasi Sosial.”*
7. *“Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan:Pegangan Untuk Membangun Hak Asasi Manusia.”*
8. *“Human Rights Watch.”*
9. *“Landreform di Pedesaan.”*
10. *“Pendidikan Popular.”*

Mansur Fakih juga membahasakan gender dengan agenda kemanusiaan yang dapat meminimalisir resistensi sebagian mereka, bahwa gender adalah paket dari Barat atau progam dari orang-orang Yahudi. Beliau menyakinkan bahwa kaum laki-laki harus ikut bertanggung jawab untuk menyudahi ketidakadilan gender tersebut. sejak tahun 2002 sampai 2004, beliau menjadi anggota Komnas HAM. Namun, pada tanggal 16 Februari 2004, berbagai media nasional mengabarkan bahwa Mansur Fakih meninggal dunia setelah terkena serangan jantung yang ketiga kalinya dan dimakamkan di Sleman Jogjakarta.

1. **Konsep Mansur Fakih Mengenai Keadilan Gender**

Orang yang pertama kali mempopulerkan mengenai konsep kesetaraan gender adalah Gayle Rubin, yang mendefinisikan gender sebagai *socil construction and codification of differences between the sexes refers to social relationship between women and men*. Mudahnya, gender merupakan pembedaan peran perempuan dan laki-laki dimana yang membentuk adalah konstruksi sosial dan kebudayaan. Apabila jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak dari lahir, maka gender adalah sesuatu yang dibentuk karen pemahaman yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Konsep gender merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah hubungan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Mansour Fakih mendefinisikan gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari konstruksi sosial dan kultural. Seperti anggapan bahwa perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan dan seorang laki-laki dianggap rasional, kuat jantan, dan perkasa adalah ciri atau sifat yang tidak permanen atau dapat dipertukarkan, dalam artian bahwa sifat laki-laki dapat ada pada perempuan begitupula sebaliknya.

Kata gender dalam istilah bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu “gender”. Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan pengertian antara *sex* dan *gender.* Gender sering dipersamakan dengan seks (jenis kelamin laki-laki dan perempuan). Untuk memahami konsep gender maka harus dapat dibedakan antara kata gender dengan seks (jenis kelamin). Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembagian dua jenis kelamin (penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya, manusia dengan jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala dan memproduksi sperm sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi, seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina, serta memiliki alat untuk menyesui. Hal tersebut secara biologis, sudah melekat pada manusia yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Artinya secara biologi alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan, secara permanen tidak berubahh dan sudah merupakan ketentuan biologis atau kodrat.

Gender adalah seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminim atau maskulin (Julia Cleves Mosse, 1996: 3). Perilaku khusus tersebut mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam maupun di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan lain sebagai yang secara bersamaan memoles peran gender kita. Kita mulai mempelajari peran gender sejak dari lahir, dimana kaum ibu biasanya diundang untuk bermain dengan bayi orang lain yang kemudian didandani sebagai anak perempuan ataupun anak laki-laki. Tidak hanya gender dari seorang bayi yang dapat menimbulkan berbagai macam tanggapan dari kaum perempuan, namun perilaku yang serupa dari seorang bayi yang ditanggapi secara berbeda-beda. Ketika seorang bayi didandani sebagai laki-laki, maka kaum perempuan akan menanggapi inisiatif bayi dengan aksi fisik dan permainan. Namun, ketika bayi yang sama tampak seperti perempuan dan melakukan hal yang sama, kaum perempuan itu menenangkan dan menghiburnya.

Orang dewasa akan cenderung mempercayai bahwa kita hidup dengan kadar kebebasan yang signifikan, dimana kita bebas dalam memilih cara berperilaku, cara berpikir, dan memilih peran gender. Suatu masyarakat dapat memiliki kebiasaan yang berbed, tetapi nilai inti dari suatu kultur dari suatu kultur yang mencakup peran gender berlangsung dari generasi ke genarasi seperti halnya bahasa. Peran-peran gender dapat berubah seiring waktu dan berbeda antara satu kultur dengan kultur yang lainnya. Peran tersebut sangat dipengaruhi oleh kelas sosial, usia dan latar belakang etnis. Gender bukanlah definisi permanen tentang cara alami bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk berperilaku. Gender dapat menemukan akses kita terhadap pendidikan, kerja, alat-alat dan sumber daya yang diperlukan untuk industri dan keterampilan. Gender juga dapat menentukan kesehatan, harapan hidup dan kebebasan gerak kita dan yang pasti genderlah yang akan menentukan seksualitas, hubungan dan kemampuan untuk membuat keputusan dan bertindak secara autonom. Selain itu, gender juga dapat menjadi satu-satunya faktor terpenting dalam membentuk kita akan menjadi apa nantinya.

Dalam setiap masyarakat antara kaum laki-laki dan kaum perempuan memiliki peran gender yang berbeda. Terdapat perbedaan pekerjaan yang dilakukan mereka dalam komunitasnya dan status maupun kekuasaan mereka dalam masyarakatnya dapat berbeda pula. Adanya perbedaan jalan perkembangan peran gender dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lingkungan alam hingga cerita dan mitos-mitor yang digunakan untuk memecahkan teka-teki adanya perbedaan jenis kelamin.

Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia berjeneis kelamin laki-laki dan perempuan terjadai melalu proses yang begitu panjang. Oleh sebab itu, dapat terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Dengan melalui proses-proses yang begitu panjang, menyebabkan sosialisasi gender tersebut dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi sehingga adanya perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Begitupun sebaliknya, dengan melalui dialektika, konstruksi sosial gender yang tersosialisasikan secara evolusional dan perlahan-lahan akan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin.

Menurut Mansour Fakih dalam Riant Nugroho (2008:18), mengemukakan bahwa:

Analisis gender dalam sejarah pemikiran manusia tentang ketidakadilan sosial dianggap suatu analisis baru yang yang kalah mendasar dibanding analisis ilmu sosial lainnya, bahkan analisis gender justru ikut mempertajam analisis kritis yang sudah ada**.**

Dalam konteks gender, keadilan berarti telah terpenuhinya hak-hak seorang perempuan menurut ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakannya beberapa kewajiban sebagaimana layaknya seorang perempuan, baik sebagai seorang ibu, istri dan sebagai pendidik. Memberikan kesempatan bagi kaum perempuan yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk berperan aktif dalam rutinitas sebagaima kaum laki-laki. Namun, persoalan pemenuhan hak-hak tersebut masih terlihat minim, sangat jarang terlihat ada seorang laki-laki yang begitu memperhatikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh kaum perempuan. Oleh karena itu, tidak heran apabila dikemudian hari banyak terjadi ketidakadilan gender.

Mansour Fakih adalah orang yang sudah cukup lama bergelut dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan hak asasi manusia, beliau cukup berhasil menelajangi ideologi teori-teori pembangunan dan globalisasi, sehingga kita semua terutama para aktivis sosial menjadi awas terhadap adanya masalah ini. Hal tersebut sangatlah penting, agar gerakan sosial yang sudah cukup banyak berakar dari bawah tidak akan sia-sia. Keadilan dan kesetaraan gender dapat dipenuhi apabila terdapat jaminan yang pasti dari undang-undang atau hukum. Relasi gender tidak semata lahir dari kesadaran individu, tetapi juga bergantung pada faktor ekonomi, sosial dan lingkungan yang sehat dan dinamis.

1. **Permasalahan Ketidakadilan Gender di Indonesia**

Gender merupakan produk budaya yang dibangun atas dasar ide bahwa secara fungsional terdapat dua kategori dalam masyarakat, yaitu laki-laki dan perempuan. Di negara-negara maju, kaum wanita telah mendapat legitimasi hukum. Oleh karena itu, kehidupan mereka relatif lebih terjamin dibangdingkan nasib wanita di negara-negara berkembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan peradaban suatu kelompok masyarakat sangat menentukan posisi dan status wanitanya. Dengan demikian, semakin maju peradaban semakin baik penghargaan yang diberikan kepada wanita.

Fakta-fakta yang dapat kita lihat di seluruh dunia bahwa memang menunjukkan adanya ketidakseimbangan besar anatara perempuan dan laki-laki. Adanya ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal tersebut dapat kita dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Jika kita ingin memahami manusia yang mendiami bumi ini dan hal tersebut dianggap semakin penting dikarenakan hanya dengan pemahaman tersebut yang akan memungkinkan manusia untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya, maka mau tidak mau perempuan yang jelas berbeda dengan laki-laki dan berjumlah lebih dari separuh penduduk bumi, maka harus dipahami secara tepat.

Sekalipun terdapat berbagai konsep yang baik tentang perempuan, namun dalam praktiknya hanya terdapat satu kenyataan, yaitu perempuan berada di bawah dominasi laki-laki. Kaum laki-laki yang membangun dunia dimana terdapat perempuan di dalamnya atau dengan kata lain, laki-laki dan perempuan itu tidak setara. Kedudukan kaum perempuan dan peranannya di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan dan di semua kelompok etnis dikupas, tidak lepas dari permasalahan-permasalahan tersebut. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun, pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan hanya bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki.

Di Indonesia, kesetaraan gender selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan setiap tahunnya. Pada saat memperingati Hari Kartini dimana momen ini sangat pas untuk melakukan penilaian apakah emansipasi kaum perempuan dan kesetaraan gender telah dicapai oleh Indonesia. Persoalan perempuan berkaitan dengan masalah kesetaraan gender memang dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat luas. Hal tersebut terjadi karena permasalahan kesetaraan gender sering dianggap erat kaitannya dengan persoalan keadilan sosial dalam arti yang lebih luas, yaitu isu-isu yang berkisar pada masalah kesenjangan orang kaya dan miskin hingga ketimpangan ekonomi antara negara kaya dan miskin hingga ketimpangan ekonomi antara negara kaya dan miskin. Namun, kesetaraan gender ini juga dapat mengundang rasa ambivalensu bahkan antipati baik dari kelompok aktivis perempuan maupun dari masyarakat umum.

Pada dasarnya kaum perempuan dan laki-laki memang berbeda. Gender lebih ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat. Oleh karena itu, gender penting untuk di pahami dan di analisa agar dapat melihat apakah perbedaan tersebut menimbulkan diskriminasi dalam artian perbedaan yang membawa kerugian dan penderitaan terhadap pihak perempuan. Sebenarnya, kita telah memiliki basis legal yang telah menjamin hak-hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Hal tersebut terlihat dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang di buat oleh PBB pada tahun 1993. Namun, sayangnya deklarasi tersebut tidak begitu dikenal oleh masyarakat di Indonesia, sehingga jarang sekali digunakan sebagai acuan dalam kegiatan penyelesaian masalah yang berbasis gender.

Riant Nugroho, (2011:29) menyatakan bahwa:

Kesetaraan gender dapat juga berarti adanya kesamaan antara kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan & keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara peremmpuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Dalam kenyataannya kesetaraan gender belum sepenuhnya terpenuhi. Secara kasat mata masih terdapat orang yang menganggap bahwa derajat dan hak-hak perempuaan berada di bawah laki-laki. Kaum laki-laki sangat dipercaya memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada wanita dalam hal apapun. Baik itu intelegensi, kemampuan bekerja, daya tahan tubuh dan berbagai hal lainnya yang bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Meskipun demikian di zaman modern ini, sekat-sekat antara pemisah antara wilayah laki-laki dan perempuan dipercaya semakin tipis, karena perempuan mulai mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki.

Kesetaraan gender di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi, dapat kita lihat dalam data angka Indeks Ketidaksetaraan Gender di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Dilihat secara keseluhuran bahwa kesetaraan gender belum dapat sampai pada titik yang pas. Peranan kaum perempuan dalam berbagai sektor masih dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan agar dapat menumbuhkan ekonomi negara. Salah sau masalah krusial yang dihadapi kaum perempuan adalah tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Data pada Komnas Perempuan menunjukkan tingginya tingkat kekerasn terhadap perempuan di dalam rumah tangga pada tahun 2015 tercatat mencapai 321.752 kasus. Hal tersebut seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin semua warga negara Indonesa memiliki hak dan kedudukan yang sama di muka hukum, menjadi acuan pokok bagi pergerakan wanita untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan kedudukannya. Kesetaraan gender merupakan aspek vital dalam memajukan HAM dan tata laksana pemerintah. Selain itu, perempuan juga harus mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berkontribusi dalam segala bidang termasuk politik dan ekonomi. Dengan adanya keadilan gender tidak akan ada lagi pembakauan peran, beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Riant Nugroho, (2011:158) menyatakan bahwa:

Pengakuan atas hak-hak perempuan seperto hak reproduksi, hak ekonomi, hak mendapat upah yang layak, hak dalam perkawinan, hak dalam waris, hak dalam pendidikan, hak dalam kesehatan dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika mengalami berbagai ketidakadilan seperti pelecehan, kekerasan dalam berbagai bentuk merupakan kepentingan mendasar yang harus terus-menerus diperjuangkan ditegaskan sebagai hak asasi manusia. Diabaikannya hak-hak ini sama artinya dengan penindasan yang berkepanjangan bagi umat manusia.

Perjuangan persamaan hak bagi wanita sesunggahnya merupakan penguatan hegemoni kekuasan gender dalam sistem patriarki. Pada struktur permukaan, wanita diberikan hak-hak yang sama, yang sesungguhnya tidak berpengaruh pada lapisan bawah sistem kekuasaan gender, sehingga tidak memberikan dampak apapun. Wanita tetap berada pada posisi marginal dan peran mereka tidak dapat terlepas dari sistem hirarki gender.

Perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan dapat dilihat dari berbagai manifestasinya, yaitu sebagai berikut:

1. Marginalisasi

Marginalisasi juga berarti suatu proses peminggiran akibat adanya oerbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Timbulnya kemiskinan dalam masyarakat dan negara merupakan sebagai akibat dari proses marginalisasi yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh beberapa kejadian yang ada. Bentuk marginalisasi yang paling dominan terjadi terhadap kaum perempuan disebabkan oleh gender. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Namun tidak semua bentuk marginalisasi perempuan disebabkan oleh *gender inequalities* (ketidakadilan gender). Yang menjadi permasalahan adalah bentuk marginalisasi yang disebabkan oleh *gender differences* (perbedaan gender), apabila ditinjau dari sumbernya dapat berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan tafsir agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Misalnya, progam pertanian *green revolution* yang hanya memfokuskan petani laki-laki sehingga secara ekonomis menyebabkan banyak perempuan desa yang akhirnya tersingkir dan menjadi miskin. Hal tersebut diakibatkan adanya asumsi bahwa petani identik dengan jenis kelamin laki-laki sehingga petani perempuan banyak yang tersingkirkan dari sawah. Ditambah adanya progam kredit untuk kaum petani laki-laki dan adanya progam pelatihan bagi petani laki-laki. Dengan adanya hal tersebut, mengakibatkan kaum perempuan miskin di desa termarginalisasi, yakni semmakin miskin dan tersingkirkan karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah. Hal tersebut menunjukan bahwa progam *green revolutin* dirancang tanpa mempertimbangkan adanya aspek gender.

Contohnya saja di Jawa, progam revolusi hijau dengan memperkenalkan jenis padi unggul yang tumbuh lebih rendah dan pendekatan panen dengan sistem tebang menggunakan sabit tidak memungkinkan lagi panenan dengan menggunakan ani-ani, padahal alat tersebut melekat dan digunakan oleh kaum perempuan. Oleh sebab itu, banyak kaum perempuan yang miskin di desa termarginalisasi, yakni semakin miskin dan tersingkirkan karena tidak mendapatkan pekerjaan di sawah pada saat musim panen tiba.

Marginalisasi kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan, namun juga terjadi di dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan negara. Marginalisasi terhadap kaum perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Selain itu, marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir agama. Contohnya saja di Indonesia, banyak diantara suku-suku yang tidak memberikan hak kepada kaum perempuan untuk mendapatkan warisan sama sekali.

1. Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Proses subordinasi disebabkan karena gender terjadi dalam segala mascam bentuk mekanisme yang berbedadari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan. Misalnya, adanya peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dimana jika suami akan bepergian untuk belajar yang jaraknya jauh dari keluarga maka dapat mengambil keputusan sendiri sedangkan bagi istri harus dapat seizin dari suami. Selain itu dalam rumah tangga, dimana kondisi keuangan rumah tangga yang terbatas masih sering terdengar adanya prioritas untuk bersekolah bagi kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan, karena adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Hal tersebut muncul dari kesadaran gender yang tidak adil.

1. Stereotipe

Stereotipe merupakan penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu. Akibat dari adanya stereotipe, yakni timbul diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Salah satu bentuk stereotipe bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali bentuk stereotip yang terjadi dalam masyarakat yang diletkatkan kepada kaum perempun sehingga berakibat menyulitkan, membatasi, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Misalnya, adanya sebuah keyakinan di masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebgai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehingga pekerja perempuan bleh dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki. Selain itu, adanya sebuah anggapan dari masyarakat bahwa tugas perempuan yakni melayani suami. Stereotipe seperti itu memang suatu hal yang wajar, namun berakibat pada menomorduakan pendidikan bagi kaum perempuan.

1. Violence

Violence merupkana serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seorang yang dilakukan terhadao jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk kekerasan tersebut antara lain pemerkosaan, pemukulan, pelecehan dan penciptaan ketergantungan. Violence terhadap perempuan banyakk sekali terjadi karena adanya stereotipe gender. Adanya pemerkosaan yang merupakan salah satu bentuk violence yang sering kali terjadi sebenarnya disebabkan bukan karena unsur kecantikan melainkan karena kekuasaan dan stereotipe gender yang dilekatkan kepada kaum perempuan. *Gender violence* disebabkan karena adanya ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Bentuk dan maam kejahatan yang tergolong dalam kategori *gender violence* meliputi, antara lain:

1. Bentuk pemerkosaan terhadap kaum perempuan, perkosaan dalam perkawinan juga termasuk di dalamnya.
2. Serangan fisik dan tindakan pemukulan yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk diantaranya penyiksaan terhadap anak-anak.
3. Penyiksaan yang mengarah kepada organ alat kelamin, misalnya penyunatan terhadap kaum perempuan.
4. *Prostitution* (pelacuran) merupakan bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan yang dilakukan dengan motif ekonomi yang merugikan kaum perempuan.
5. Pornografi merupakan jenis kekerasan nonfisik terhadap kaum perempuan, yakni berupa pelecehan terhadap kaum perempuan dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
6. Kekerasan dalam bentuk pemaksaan sterilasasi dalam prgam keluarga berencana.
7. Jenis kekerasan terselubung, yakni menyentuh atau memegang tertentu dari tubuh kaum perempuan denggan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
8. Tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling umum dilakukan di masyarkata, yakni pelecehan seksual. Ada beberapa bentuk yang dapat dikategorikan dalam bentuk pelecehan seksual, diantaranya yaitu:

* Menyakiti atau membuat malu seseorang dengan perkataan yang kotor.
* Meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja.
* Menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa seizin ataupun meminta maaf.

1. Beban Kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas yakni mengelola rumah tangga sehingga banyak kaum perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih lama dan lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Kaum perempuan mimiliki sifat rajin dan tidak cocok apabiila menjadi kepaa rumah tangga. Bahkan bagi kalangan keluarga miskin, beban yang harus ditanggung oleh kaum perempuan sangat berat apalagi jika si perempuan harus bekerja di luar untuk tambahan kebutuhan keluarga sehingga kaum perempuan harus memikul beban kerja yang ganda. Namun, bagi kelompok masyarakat yang miliki tingkat ekonomi yang terblang cukup, biasanya beban kerja domestik dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga. Dengan demikian, kaum perempuan ini merupakan korban dari bias gender di masyarakat.

Gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra, karena disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum, adanya gender telah melahirkan peran, tanggung jawab, fungsi dan ruang tempat dimana manusia beraktivitas.
2. Perbedaan gender melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa eakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologi yang dimiliki oleh perempuan dan lakilaki.
3. Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, sifat, dan fungsi yang terpola, diantaranya sebagai berikut:

* Konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder dan feminim.
* Konstruksi sosial dan peran citra baku.
* Konstruksi agama dan keyakinan kitab suci agama.

1. Anggapan bahwa sikap perempuan feminim atau laki-laki maskulin bukanlah sesuatu yang mutlak kepemilikan manusia atau jenis kelamin biologinya.
2. Dengan demikian, gender adalah perbedaan peran, sifat, tugas, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.
3. Secara sosiologis, ada 2 konsep yang menyebabkan terjadinya perbedaan laki-laki dan perempuan, yaitu:

* Konsep nurture: Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda.
* Konsep nature: Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima

1. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender. Agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidakadilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki.
2. Kesetaraan dan keadilan gender tidak terlepas dari proses perjuangan hak-hak azasi manusia (HAM) yang dideklarasikan PBB tahun 1948. Pelaksanaan HAM memberikan aspirasi bagi kaum perempuan dalam mengatasi kepincangan dan ketidakadilan perlakuan sebagai konstruksi sosial, yang menempatkan perempuan dalam status di belakang laki-laki.
3. Konsep kesetaraan gender menjadi sangat penting, dimana perempuan dan laki-laki merupakan mitra sejajar yang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan mempunyai andil yang seimbang terhadap pembangunan di berbagai bidang sektor

Riant Nugroho, (2011: 4) menyatakan bahwa:

Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan, oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada.

Akibat dari rasa ketidakadilan, mucul berbagai gerakan yang memberontak terhadap stigma-stigma yang telah ada. Salah satunya muculnya gerakan “Feminisme”. Gerkan tersebut merupakan gerakan yang selalu marak dan tidak pernah selesai diperjuangkan sekaligus selalu menarik untuk diperbincangkan, diperdebatkan dan didiskusikan. Pro dan kontra terhadap ide gerakan feminisme senantiasa hangat untuk dibicarakan dari berbagai sudut pandang.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan syarat yang mutlak untuk menciptakan tantanan masyarakat yang adil dan manusiawi. Oleh sebab itu, apabila terdapat anggapan bahwa kesetaraan dan keadilan gender (feminisme) merupakan upaya untuk merusak tatanan masyarakat yang telah baku merupakan hal yang salah. Yang benar adalah kesetaraan dan keadilan gender menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan manusiawi atau dapat juga disebut sebagai upaya laki-laki dan perempuan dalam melawan sistem yang tidak adil.

Feminisme lahir karena berlatar belakang dari permasalahan yang berbeda. Timbulnya gerakan feminisme tidak lepas dari pengaruh perbedaan latar belakang tingkat pendidikan, kesadaran, kelas sosial dan lain sebagainya. Faktor utama yang membuat gerakan ini lahir salah satunya adalah karena adanya asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasikan. Selain itu, juga karena didominasi laki-laki dalam sistem masyarakat patriakhi dan adanya pensubordinasian perempuan sehingga perempuan terkumpul dan membuat aksi, sehingga lahirlah gerakan feminisme.

Secara umum para feminis menginginkan kesetaraan gender yang sama rata antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek kehidupan, baik dilingkungan keluarga, maupun masyarakat. Feminisme bukan hanya perjuangan emansipasi dari kaum perempuan terhadap kaum laki-laki saja, karena mereka juga menyadari bahwa laki-laki khususnya kaum proletar mengalami penderitaan yang diakibatkan oleh dominasi, eksploitasi, dan represi dari sistem yang tidak adil. Namun, pada umumnya orang berprasangka bahwa feminisme merupakan gerakan pembrotakan terhadap kaum laki-laki dalam upaya melawan pranata sosial yang ada, misalnya institusi rumah tangga, perkawinan maupun usaha pemberontakan perempuan untuk mengingkari kodratnya. Dengan adanya kesalahpahaman seperti hal tersebut, maka feminisme tidak hanya kurang mendapatkan tempat di kalangan kaum perempuan, bahkan ditolak oleh masyarakat. Jadi, sebenarnya gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Gerakan feminisme telah banyak membuktikan minimal menyumbangkan inspirasi pemikiran, bahkn pemahaman terhadap terciptanya dunia yang lebih adil Mansour Fakih (2012: 127).

Gerakan feminisme bukanlah gerakan yang semata-mata menyerang laki-laki, melainkan merupakan gerakan perlawanan terhadap sistem yang tidak adil, serta cipta partriakal bahwa perempuan itu pasif, bergantung atau tidak mandiri dan inferior. Tujuannya tidak hanya memperbaiki status perempuan dengan menggunakan ukuran indikator norma laki-laki, tetapi untuk meningkatkan martabat dan kekuatan perempuan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut sangat diperlukan perubahan peran gender, baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Berikut ini tujuan lain feminisme sebagai suatu gerakan, yakni:

1. Mencari cara dalam penataan ulang yang berkaitan dengan nilai-niai di dunia dengan mengikuti kesamaan gender (jenis kelamin) dalam konteks hubungan kemitraan universal dengan sesama manusia.
2. Menolak adanya setiap perbedaan antara manusia yang dibuat atas dasr perbedaan jenis kelamin.
3. Menghapuskan seluruh hak-hak istimewa ataupun pembatasan-pembatasan tertentu atas dasar jenis kelamin.
4. Berjuang untuk membentuk pengakuan kemanusiaan yang menyeluruh tentang laki-laki dan perempuan sebagai dasar hukum dan peraturan tentang manusia dan kemanusiaan.

Secara sederhana, gerakan feminisme di Indonesia dibagi dalam tiga dasawarsa. Dasawarsa pertama pada tahun 1970-an yang merupakan tahap pelecehan. Selama tahun 1975-1985 hampir semua aktivis LSM menganggap bahwa masalah gender bukan masalah yang penting, karena menganggap tidak penting banyak yang melakukan pelecehan. Pada periode dasawarsa kedua (1985-1995) merupakan dasawarsa pengenalan dan pemahaman dasar tentang analisis gender dan mengapa isu gender menjadi sebuah masalah dalam pembangunan. Dalam dasawarsa kedua muncul berbagai tantangan, contohnya saja dari pemikiran dan tafsiran keagamaan yang pratiarki. Sehubungan dengan adanya pemikiran dan tafsiran keagamaan tersebut diperlukannya berbagai kajian terhadap ajaran-ajaran agama yang bias gender. Pada dasawarsa ketiga, tantangannya yaitu tantangan gerakan kilas baik dari aktivis, baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masalah ketidakadilan gender telah mencapai puncak dinamikanya dan selanjutnya mulai merasakan adanya persoalan yang ditimbulkan dan harus dihadapi.

Namun, selama nilai-nilai pemahman yang dianut didalam masyarakat masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat, termasuk dengan konsep pengiburumah tanggaan, selama itupun akan sulit untuk mengubah kondisi kerentanan perempuan. Apabila ingin mengatasi kemiskinan yang membelenggu masyarakat, itu berarti membebaskan perempuan dari kemiskinan, dengan upaya pemberdayaan yang dimotori oleh lembaga dan kader lokal yang memiliki wawasan tentang gender.

Menurut Singarimbun dalam Riant Nugroho (2011:156), menyatakan bahwa:

Kesulitan untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi kaum laki-laki dan perempuan menurut UNDP disebabkan karena adanya beberapa alasan, yakni; (a) kurangnya komitmen politik; (b) salah arah kebijakan; dan (c) ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Kendala-kendala yang berasal dari nilai-nilai ideologi yang dominan, yakni ideologi patriarki juga memberi kontribusi cukup besar, sebagai faktor yang mempersulit upaya untuk mewujudkan kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki.

Dengan demikian, hambatan untuk memperbaiki status sosial bagi perempuan tidak hanya berasal dari nilai-nilai budaya masyarakatnya, namun juga dari sisi politik negara dimana sebuah masyarakat berada. Hambatan seperti tersebut dikategorikan sebagai hambatan ideologis, yakni hambatan yang berasal dari nilai-nilai ideologi masyarakat. Selain hambatan tersebut, terdapat hambatan lain, yaitu hambatan material yang berupa kendala yang berasal dari faktor kemampuan pribadi perempuan.

Adanya hambatan pemahaman yang muncul di kalangan masyarakat disebabkan karena adanya pandangan yang sangat kuat mengenai sistem nilai, norma, mitos serta pelabelan tentang perempuan. Sistem tersebut terus tumbuh dan berkembang di dalam konsensus masyarakat yang dipelihara secara turun-temurun dan dijadikan sebagai panutan. Adanya pemahaman gender tersebut banyak mempengaruhi tingkah laku perempuan dalam hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Pemahaman tersebut dapat diartikan, bagaimana laki-laki dan perempuan didefinisikan, dinilai, dipersepsikan dan diharapkan dalam bertingkahlaku. Dimana perempuan dan semua hal yang dilakukannya harus memiliki sifat yang feminim, seperti lemah lembut, halus, membutuhkan perlindungan dan lain sebagainya. Sedangkn bagi kaum laki-laki harus memiliki sifat yang maskulin, dimana laki-laki harus bersifat gagah dan mampu melindungi kaum perempuan.

Beberapa alasan penolakan terhadap kaum feminisme terjadi, yaitu:

1. Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami substansi feminisme, dimana banyak orang menjadi korban pengertian tentang feinisme yang dianggap negatif.
2. Kaum perempuan sudah terlanjur merasa nyaman untuk menikmati penderitaan, begitupula masyarakat merasa diuntungkan oleh adanya sistem dan struktur yang pada kenyataannya tidak adil.

Kondisi tersebut diperkuat dengan sebuah kesimpulan bahwa penolakan terhadap feminisme sesungguhnya merupakan manifestasi ketidakuatan akan adanya sebuah perubahan, sehingga kaum feminisme pun masih menerima sebuah nasib yang masih diremehkan. Sejarah yang semakin sinis membakukan sebuah isu logika Phallus, yang mengakibatkan reformulasi pola relasi dan kuasa antara laki-laki dan perempuan yang diajukan kaum feminisme dianggap sebagai suatu ancaman terhadap kemapanan tradisi, instituri keluarga dan ideologi patriarkhi. Akhirnya para aktivis politik feminis pada umumnya mengkampayekan adanya isu-isu seperti hak reproduksi, kekrasan dalam rumah tangga, meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan keibuan, kesetaraan gaji, pelecehan seksual, diskriminasi dan kekerasan seksual.

Sekitar tahun 1960-1970, banyak dari feminisme dan teori fminisme disusun dan difokuskan pada permasalahan yang dihadapi oleh wanita-wanita barat, ras kulit putih dan kelas menengah. Yang kemudian permasalahan-permasalahn tersebut diklaim sebagai persoalan universal mewakili seluruh wanita. Sejak saat itulah, banyak teori-teori feminisme yang menentang asumsi bahwa perempuan merupkan kelompok individu-individu yang serba sama dengan kepentingan yang serupa. Akhirnya banyak para aktivis feminis yang muncul dari berbagai komunitas dan teori-teorinya merambah ke lintas gender dengan berbagai identitas sosial lainnya. Banyak kalangan feminis saat ini yang menganggap bahwa feminisme adalah suatu gerakan yang muncul dari lapisan bawah yang berusaha melampui batasan-batasan yang didasarkan pada kelas sosial, ras, budaya dan agama. Sejak saat itu, para feminis menjadi kritik terhadap ketidakadilan gender.

1. **Upaya Mengatasi Masalah Ketidakadilan Gender yang ada di Indonesia**

Memperjuangkan keadilan gender merupakan tugas berat, karena melibatkan manusia secara emosional, keyakinan, bahkan sampai pada urusan negara. Apabila kita ingin keluar dari adanya permasalah gender ini perlunya dilakukan upaya jangka pendek dan jangka panjang. Upaya jangka pendek difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis ketidakadilan gender, dimana kita dapat melakukan upaya-upaya progam aksi yang melibatkan kaum perempuan agar mampu untuk membatasi masalahnya. Contohnya dalam hal untuk mengatasi masalah marginalisasi perempuan diberbagai kegiatan dalam rangka peningkatan pendapatan kaum perempuan maka diperlukan keterlibatan kaum perempuan dalam progam pengembangan masyarakat dan berbagai kegiatan yang memungkinkan kaum perempuan dapat terlibat bahkan dapat menjalankan kekuasaan di sektor publik.

Langkah berikutnya yakni usaha jangka panjang untuk memikirkan bagaimana menemukan cara strategis dalam rangka memerangi ketidakadilan. Upaya jangka panjang dapat dilakukan melalui upaya kampaye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Upaya pendukungnya adalah melalui studi tentang berbagai ketidakadilan gender dan manifestasinya, baik di masyarakat, negara, maupun di dalam rumah tangga. Hasil kajian tersebut dapat dipakai untuk melakukan advokasi guna mencapai perubahan kebijakan, hukum dan aturan pemerintah yang dinial tidak adil terhadap kaum perempuan.

Menurut Fakih dalam Nasiwan (2016:194), menyatakan bahwa:

Langkah untuk mentransformasikan masyarakat adalah dengan menciptakan hubungan yang berkeadilan dalam relasi gender. Meskipun gender telah dikenal sebgai istilah yang populer dalam dirkursus keadilan sosial di Indonesia, implementasi rill daripada keadilan gender di banyak aspek dalam masyarakat di Indonesia terutama dalam level pemerintahan masihlah sekedar hiasan bibir.

Agenda untuk mengakhiri adanya sistem ketidakadilan, daiantaranya sebagai berikut:

1. Melawan hegemoni yang merendahkan kaum perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Yang dimaksud dengan melakukan dekonstruksi yakni mempertanyakan kembali segala sesuatu yang bersangkutan dengan nasib kaum perempuan dimanapun berada, pada tingkat dan dalam bentuk apapun. Hal tersebut memiliki tujuan yakni agar dapat membangkitkan kesadaran kritis gender yakni kesadaran akan ideologi hegemoni dominan dan kaitannya dengan penindasan gender. Dengan adanya pendidikan kritis tersebut maka akan lahir sebuah gagasan dan nilai baru yang akan menjadi dasar bagi transformasi gender. Maka dari itu, tugas utama yang harus dilakukan yakni membentuk visi yang berakar pada sistem modernisasi, *developmentalism*, dan kapitalisme.
2. Melawan paradigma developmentalism yang miliki asumsi bahwa keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena kaum perempuan tidak ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, kaum perempuan dianggap tidak mampu memecahkan masalahnya, maka dari itu progam sangat perlu didesain oleh perencana yang ahli yang kemudian dikirimkan kepada mereka.

Riant Nugroho, (2011:152) menyatakan bahwa:

Perempuan dianggap sebagai objek pembangunan, yakni diidentifikasi, diukur, dan diprogamkan. Perempuan juga dianggap sebagai objek pengembangan pengetahuan mereka. Oleh karena “*knowledge is Power*”, maka riset terhadap perempuan adalah juga proses dominasi.

Dengan demikian perjuangan perempuan termasuk senantiasa mempertanyakan dominasi elit yang menggunakan pengetahuan dan diskursus pembangunan dari hegemoni kapitalisme dan modernisasi, karean riset tersebut memiliki sebuah tujuan yaitu agar dapat memahami perempuan. Dengan memahami perempuan maka akan dapat memprediksi perilaku perempuan dalam rangka merekayasa peranannya dalam pembangunan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan mengenai kesetaraan gender, diantaranya sebagai berikut:

1. Pembakuan istilah gender dengan acuan pada keberadaan segala sesuatu yang ada di masyarakat secara tradisi, dengan mempertimbangkan berbagai muatan sosial budaya, ekonomi, dan politik dalam konteks akses terhadap berbagai muatan pembangunan.
2. Pendekatan analisis gender tidak lagi sekedar merujuk pada pembedaan biologis atau seks (laki-laki ataupun perempuan) atau sifat perseorangan akan tetapi mengacu pada perspektif gender menurut dimensi sosial-budaya.
3. Perencanaa pembangunan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan peran gender dan ketergantungan antara laki-laki dan perempuan sebagai sesuatu hal yang dapat diubah dan akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat yang bersangkutan.

Adanya sosialisasi kesetaraan gender tidak lepas dengan sendirinya dari kepedulian kaum perempuan maupun laki-laki. Pemahaman menganai kesetaraan gender tersebut akan membawa hikmah besar pada kaum perempuan dalam menyinergikan persoalan dengan lebih sistematis. Sedangkan bagi kaum laki-laki akan membantu dalam memahami dan mengantisipasi adanya kemungkinan pergeseran peran perempuan di masa yang akan datang. Harapan akan adanya kesetaraan tersebut akan menuntut keberanian kaum perempuan dan kerelaan kaum laki-laki dalam melaksanakan justiikasi terhadap mitos-mitos yang merugikan refleksi optimal dari aplikasi peran menurut gender.

Sesungguhnya organisasi massa memiliki peran yang strategis sebagai agen pembaharu atas adanya perkara gender, karena organisasi massa memiliki dan berhadapan langsung dengan massa yang banyak. Mansour Fakih menyarankan startegi *gender mainstreaming* sebagai strategi yang baik untuk mereduksi adanya ketimpangan gender, karena konsep gender terintegrasi secara kuat dalam segenap gerak lngkah organisasi, institusi atau proyek pembangunan yang ada. Untuk mewujudkan organisasi dan proyek pembangunan harus mengenderkan diri dan berusaha keluar dari adanya budaya patriarki. Dalam kehidupan sehari-hari organisa tersebut represi-represi terhadap kaum perempuan haru dihindari, sehingga mereka dapat melakukan tindakan atau aksi yang tidak mendua. Dengan tetap mengadopsi konsep organisasi yang tidak pernah berhenti belajar konsep kesetaraan gender sedapat mungkin diintegrasikan dalam strategi, struktur, sistem dan budaya organisasi tersebut.

Setelah organisasi tersebut memiliki nafas kesetaraan gender, barulah ia dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang memiliki tujuan mereduksti ketimpangan gender yang ada di sekitarnya. Kegiatan ini sangat beragam, sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut. melihat permasalahan ketidakadilan gender tersebut, organisasi massa apapun tidak akan mungkin kehilanngan cara untuk ikut serta berkiprah dalam menghapuskan ketidakadilan gender di Indonesia.

Selain itu, terdapat upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai visi Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI yang sebenarnya merupakan sebuah bentuk pembaruan pembangunan pemberdayaan perempuan yang selama tiga dasawarsa ini telah memberikan manfaat yang cukup besar. Untuk meningkatkan status dan kualitas perempuan perlunya diupayakan, namun hasilnya masih belum dapat memadai. Hal tersebut dapat kita lihat dari kesematan kerja perepua yang belum membaik, beban kerja yang masih berat, dan kedudukannya yang masih rendah. Selain itu, pada saat ini masih banyak juga kebijakan, progam dan kegiatan pembangunan yang belum peka terhadap gender.

Dalam GBHN 1999-2004 menetapkan dua arah kebijakan pemberdayaan perempuan, yakni meningkatkan kedudukan dan perenanan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diembani oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perepuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan, serta nilai historis perjuangan peempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Wujud kesetaraan dan keadilan gender, yaitu:

1. Akses: Kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada sumberdaya pembangunan. Contoh: memberikan kesempatan yang sama memperoleh informasi pendidikan dan kesempatan untuk meningkatkan karir bagi PNS lakilaki dan perempuan.
2. Partisipasi: Perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Contoh: memberikan peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk ikut serta dalam menentukan pilihan pendidikan di dalam rumahtangga; melibatkan calon pejabat struktural baik dari pegawai laki-laki maupun perempuan yang berkompetensi dan memenuhi syarat “*Fit an Proper Test*” secara obyektif dan transparan.
3. Kontrol: perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada sumberdaya pembangunan. Contoh: memberikan kesempatan yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan dalam penguasaan terhadap sumberdaya (misalnya: sumberdaya materi maupun non materi daerah) dan mempunyai kontrol yang mandiri dalam menentukan apakah PNS mau meningkatkan jabatan struktural menuju jenjang yang lebih tinggi.
4. Manfaat: pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Contoh: Program pendidikan dan latihan harus memberikan manfaat yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Gender merupakan pembedaan peran perempuan dan laki-laki dimana yang membentuk adalah konstruksi sosial dan kebudayaan. Dapat terbentuknya perbedaan-perbedaan gender disebabkan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan maupun negara. Dalam konteks gender, keadilan berarti telah terpenuhinya hak-hak seorang perempuan menurut ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakannya beberapa kewajiban sebagaimana layaknya seorang perempuan, baik sebagai seorang ibu, istri dan sebagai pendidik. Memberikan kesempatan bagi kaum perempuan yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk berperan aktif dalam rutinitas sebagaima kaum laki-laki. Namun, persoalan pemenuhan hak-hak tersebut masih terlihat minim, oleh karena itu tidak heran apabila dikemudian hari banyak terjadi ketidakadilan gender.

Adanya ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Kedudukan kaum perempuan dan peranannya di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan dan di semua kelompok etnis dikupas, tidak lepas dari permasalahan-permasalahan tersebut. Pada dasarnya kaum perempuan dan laki-laki memang berbeda. Gender lebih ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada dan dibuat oleh masyarakat. Dalam kenyataannya kesetaraan gender di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Secara kasat mata masih terdapat orang yang menganggap bahwa derajat dan hak-hak perempuaan berada di bawah laki-laki. Kaum laki-laki sangat dipercaya memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada wanita dalam hal apapun. Baik itu intelegensi, kemampuan bekerja, daya tahan tubuh dan berbagai hal lainnya yang bahkan tidak terpikirkan oleh kita. Padahal di Indonesia sendiri telah memiliki basis legal yang menjamin hak-hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan.

Akibat dari rasa ketidakadilan, mucul berbagai gerakan, salah satunya gerakan “Feminisme” yang muncul, karena adanya asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasikan. Gerakan feminis menginginkan kesetaraan gender yang sama rata antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek kehidupan, baik dilingkungan keluarga, maupun masyarakat. Apabila kita ingin keluar dari adanya permasalah gender ini perlunya dilakukan upaya jangka pendek yang difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis ketidakadilan gender dan upaya jangka panjang untuk memikirkan bagaimana menemukan cara strategis dalam rangka memerangi ketidakadilan.

1. **Saran**

Untuk mewujudkan keadilan gender, Indonesia harus menegakkan kesetaraan gender terlebih dahulu sehingga akan tercipta keadilan seperti yang diinginkan. Kesetaraan gender berguna untuk memberi kesempatan bagi semua orang untuk menyampaikan apresiasinya. Kepada seluruh perempuan di Indonesia dihimbau untuk berperan aktif dalam memajukan posisi dan kondisi kita dalam segala aspek atau bidang pembangunan, contohnya saja melalui aktivitas-aktivitas peningkatan pengetahuan dan penyebarluasan seluruh informasi seperti yang telah dipaparkan, baik pada diri sendiri, dalam keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Dengan tetap menjaga jati diri perempuan Indonesia yang bermoral. Kesetaraan dan keadilan gender harus dapat ditegakkan dalam masyarakat, selain dalam masyarakat kesetaraan dan keadiilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan agar terwujud keadilan yang seperti diinginkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, Irwan. (2006). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fakih, M. (2012). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ullah, M. (2010). *Konsep Keadilan Gender Perspektif Mansour Fakih*. Diakses pada 30 Desember 2017, dari

<https://www.google.co.id/url?q=http://digilib.uinsby.ac.id/8366/2/bab%25202.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiCpMP7z8vYAhUIto8KHWAuAS4QFjABegQIFRAA&usg=AOvVaw1FX1s_y3KipRixNDBkyluF>

Jones, Pip. (2009). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mosse, Julia Cleves. (1993). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasiwan. & Wahyuni, Yuyun Sri. (2016). *Teori-Teori Sosial Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press.

Nugroho, Riant. (2011). *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. (2008). *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pasaribu, Vera. A. R. (2006). *Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Diakses pada 30 Desember 2017, dari

<https://www.google.co.id/url?q=https://perpustakaan.uhn.ac.id/adminarea/dataskripsi/Karya%2520Ilmiah%2520-%25201.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwj->

Putri, Echy Rosalia. (2012). *Permasalahan Gender di Indonesia*. Diakses pada 28 Desember 2017, dari

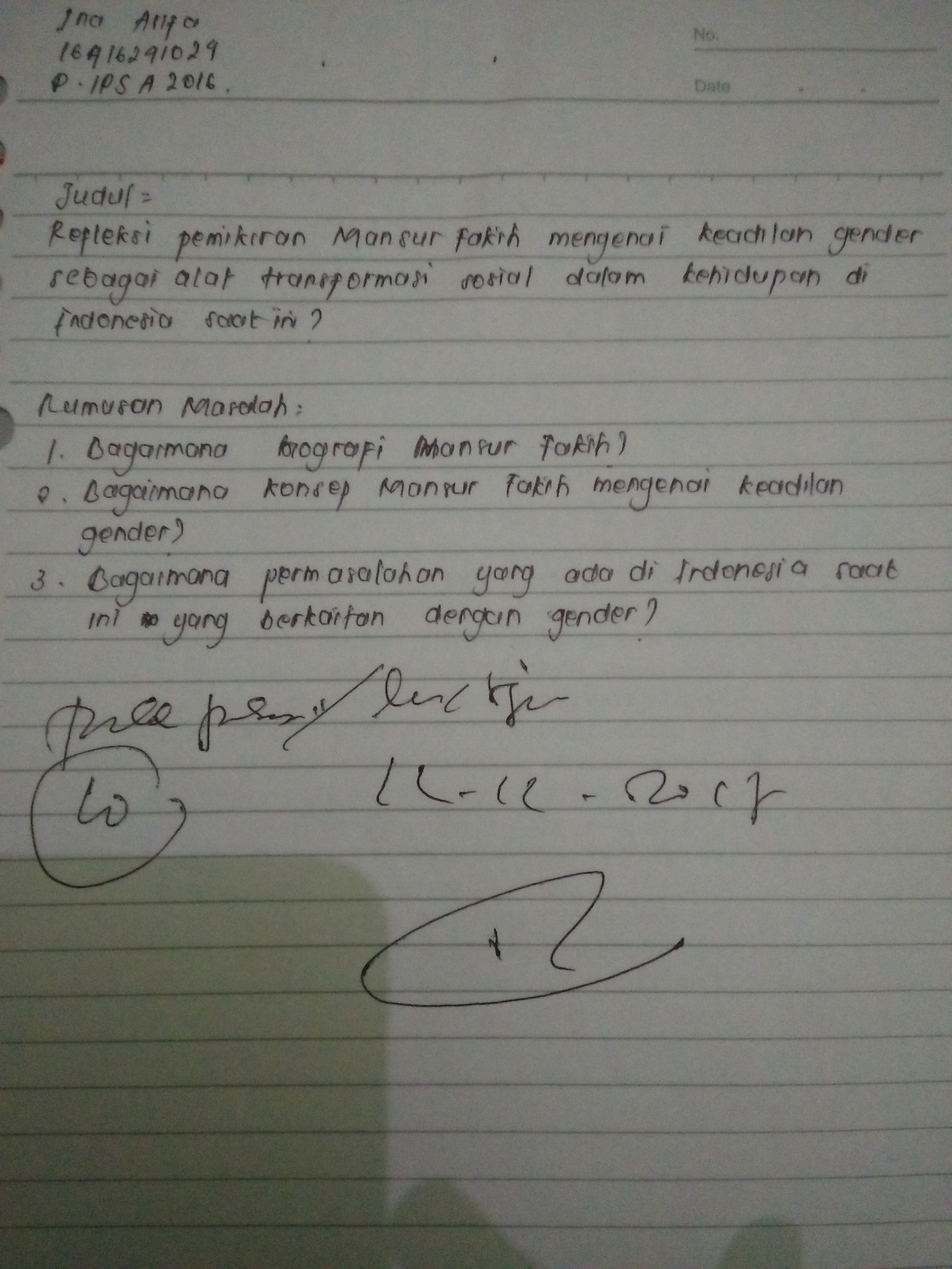
<https://www.kompasiana.com/echyrosalia/permasalahan-gender-di-indonesia_5510da6ba333110237ba8f47>

\_\_\_\_. (2017). *Di Indonesia, Kesetaraan Gender Masih Belum Sepenuhnya Tercapai*. Diakses pada 30 Desember 2017, dari

<https://www.kompasiana.com/kompasiananews/di-indonesia-kesetaraan-gender-masih-belum-sepenuhnya-tercapai_591d06287fafbdc024d1fbf2>

Sosrodihardjo, Soedjito. (1986). *Transformasi Sosial: Menuju Masyarakat Industri*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

**LAMPIRAN**

****